

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pieter Roya¹, Herman Karamoy², Hendrik Gamaliel³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹Email: peter.roya@gmail.com

ABSTRACT

The objective of research was to discover and analyze the factors that influence the financial statement quality of Bolaang Mongondow regency. The independent variables consisted of the implementation of SAP (Government Accounting Standard), the implementation of SAKD (Regional Financial Accounting System), competency of human resources, environment control, and compliance with laws and regulations. The population of the research was 48 OPD (Regional Government Organizations) in Bolaang Mongondow regency and the sample was taken by applying a saturated sampling technique. This research distributed 240 questionnaires to Budget users/Proxy of Budget Users, Commitment-making Officers, Finance Administration Officers, revenue and expenditure treasurers, and Financial Statement Prepares at OPD in Bolaang Mongondow. The data were analyze by using multiple linear regression analysis. The result demonstrated that the implementation of SAP, use of SAKD, competency of human resources, and control environment had a significantly positive influence on the financial statement quality. Compliance with laws and regulations had insignificantly positive influence on the financial statement quality of Bolaang Mongondow regency.

Keywords: financial statement quality of regional government, implementation of SAP use of SAKD, competency of human resources, environment control, and compliance with laws and regulation.

1. PENDAHULUAN

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah penilaian terkait tingkat kesesuaian pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah setiap periode anggarannya. Kualitas LKPD dapat diketahui dari pendapat yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai pihak pemeriksa dan penilai LKPD. Audit terhadap LKPD dilaksanakan setiap periode oleh BPK guna memberikan pendapatnya mengenai level kewajaran informasi pada laporan tersebut. Hasil audit tersebut dalam bentuk pendapat BPK, yakni Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Memberi Pendapat dan Tidak Wajar (Widiatmoko, 2020).

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, merupakan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat/daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berarti pemerintah pusat/daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun anggaran 2007 s/d 2020 belum memuaskan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow baru memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2021 atas Laporan Keuangan TA 2020. Opini atas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan belum memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Opini WDP maupun TW menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak andal, terdapat salah saji yang material pada beberapa pos anggaran atau laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), lingkungan pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Jauhari et al. (2021) dan Nasution (2021) menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Evicahyani dan Setiawina (2017), pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Utama et al. (2017) dan Modo et al. (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini berbeda dengan hasil temuan penelitian lain bahwa penerapan SAP, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Fikri et al., 2017), serta SAKD dan Kompetensi SDM tidak mempengaruhi Laporan Keuangan Daerah (Aprisyah dan Yuliati, 2021). Fitriani (2019) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Mawuntu et al. (2020) menyatakan bahwa pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya ditemukan adanya inkonsistensi pengaruh penerapan SAP, SAKD, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SAKD terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2010). Empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 yakni: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Teori *Stewardship*

Menurut Donalson dan Davis (1997) teori *Stewardship* merupakan suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal, dan mengasumsikan terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Teori *Goal Setting*

Menurut *goal setting theory* individu memiliki beberapa tujuan, memilih tujuan, dan mereka termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pilihan yang dibuat individu adalah tujuan yang mereka miliki. Salah satu karakteristik dari *goal setting* adalah tingkat kesulitan tujuan. Tingkat kesulitan tujuan yang berbeda akan memberikan motivasi yang berbeda bagi individu untuk mencapai kinerja tertentu (Ginting dan Ariani dalam Matana, 2017).

Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan. Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Implementasi dari peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sejak tahun 2015 seluruh laporan keuangan daerah telah menerapkan SAP berbasis akrual. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan (Evicahyani, 2017; Suparwan et al., 2018, Rohmah et al., 2020), maka dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pengaruh SAKD terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan PP nomor 65 tahun 2010, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Proses pengelolaan data dan transaksi serta penyajian laporan keuangan akan sangat terbantu jika pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini juga akan berdampak pada ketepatan waktu pemerintah daerah dalam melakukan penyajian informasi laporan keuangan daerah.

Penelitian Manullang (2017), Puspitawati (2020), dan Tang (2020) menyatakan bahwa SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga Mokoginta et al. (2017) dan Jauhari et al. (2021) menyimpulkan bahwa SAKD berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Nasution (2021) serta Aprisa dan Yuliati (2021) yang menyatakan bahwa SAKD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan bukti empiris ini maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan

Ciziuniene (2017) mengungkapkan bahwa kompetensi yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu berdasarkan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan nilai. Jadi kompetensi menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas tertentu dari suatu profesi. Kapasitas sumber daya manusia berperan penting dalam proses penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Apabila sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas pada bidangnya maka akan menghambat proses penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian melaporkan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Evicahyani 2017; Agung dan Gayatri, 2018; Gultom 2019), sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak mempengaruhi laporan keuangan (Aprisyah dan Yuliati (2021). Berdasarkan uraian ini maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan Pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang menyediakan landasan bagi kelangsungan pengendalian intern dalam organisasi. Lingkungan pengendalian yang sehat mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan (Fitriani, 2019). Beberapa bukti empiris tentang pengaruh sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya berpengaruh positif dan signifikan (Evicahyani, 2017; Latjandu et al. 2017; Moha et al., 2017; Suparwan et al., 2018), namun demikian ada juga yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan (Mokoginta et al., 2017; Rosadi et al., 2017; Fitriana et al., 2020). Berdasarkan temuan-temuan ini maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pengaruh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kepatuhan atau taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Manullang (2017), Rosadi et al. (2017) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Modo et al. (2020) dan Handayani (2020) menyatakan bahwa

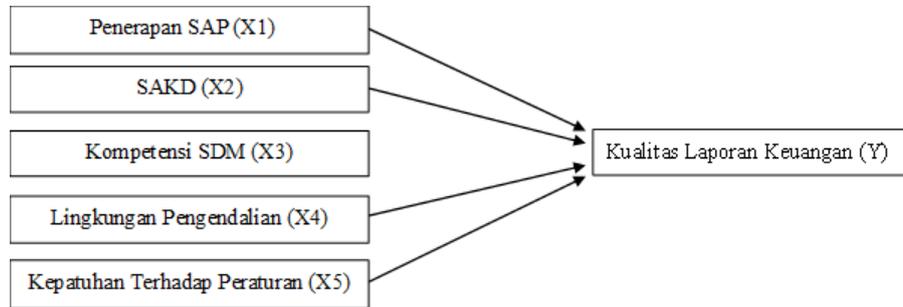
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

H5: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka konseptual



Sumber: Data olahan, 2022

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis yang berupa pengaruh antar variabel. Didalam penelitian ini pengaruh yang diteliti meliputi penerapan SAP, SAKD, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai variabel independen, serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari 5 Badan, 3 Sekretariat/Inspektorat, 25 Dinas/RSUD, dan 15 Kecamatan. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), yaitu pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada OPD/bendahara pengeluaran, dan pejabat pengelola keuangan lainnya di setiap OPD dengan total 203 responden. Kuesioner menggunakan skala Likert pada penilaian setiap butir pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban yaitu: yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S) dan sangat setuju (SS). Pertanyaan untuk mengukur variabel diadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Analisis data dalam penelitian ini meliputi: uji kualitas data (uji validitas, uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda (uji F, uji t dan uji koefisien determinasi).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji sah atau valid tidaknya item pertanyaan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan SAP, pemanfaatan SAKD, kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun kriteria pengujian validitas

adalah Jika, r hitung $>$ r tabel berarti Valid. Adapun nilai r hitung dapat dilihat pada Tabel 1. Semua item pertanyaan pada variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan Y memiliki korelasi (r) \geq 0,25 terhadap skor total pada masing-masing variabel. Nilai r hitung semua item pertanyaan $>$ r table (r tabel untuk $N = 200$ nilainya 0,138 pada taraf signifikansi 5%) sehingga dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan pada tiap variabel valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

X1	X2	X3	X4		X5	Y
r hitung						
0.724	0.768	0.644	0.563	0.675	0.588	0.755
0.715	0.558	0.617	0.61	0.574	0.618	0.753
0.745	0.837	0.666	0.578	0.711	0.504	0.722
0.76	0.779	0.491	0.62	0.583	0.763	0.808
0.738	0.762	0.554	0.664	0.613	0.829	0.752
0.71	0.843	0.532	0.725	0.554	0.714	0.753
0.711	0.657	0.758	0.505	0.611	-	0.66
0.713	0.764	0.762	0.641	0.65	-	0.604
0.713	0.846	0.752	0.682	0.692	-	0.763
0.838	0.82	0.748	0.681	0.729	-	0.65
0.762	0.784	0.759	0.683	0.735	-	0.768
0.696	-	0.769	0.715	0.726	-	-
0.708	-	0.574	0.644	0.612	-	-
0.65	-	0.447	0.686	0.686	-	-
0.818	-	0.409	0.652	0.676	-	-
0.786	-	-	0.642	0.773	-	-
0.816	-	-	0.66	0.708	-	-
0.815	-	-	0.748	0.594	-	-
0.764	-	-	0.794	0.598	-	-
-	-	-	0.708	0.711	-	-
-	-	-	0.665	0.713	-	-
-	-	-	0.744	0.698	-	-
-	-	-	0.719	0.64	-	-
-	-	-	0.634	-	-	-

Sumber: Data olahan, 2022

Hasil uji validitas reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian yang digunakan reliabel atau andal yaitu dengan melihat nilai Cronbach's alpha. Apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2013). Hasil uji realibilitas dari penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,934	0,70	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,962	0,70	Reliabel
Pemanfatan Sistem Akuntansi Keungan Daerah	0,946	0,70	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,919	0,70	Reliabel
Lingkungan Pengendalian	0,974	0,70	Reliabel
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	0,870	0,70	Reliabel

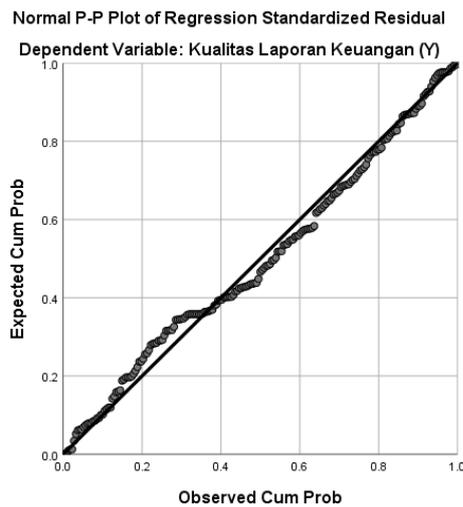
Sumber: Data olahan, 2022

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha untuk semua variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner penelitian yang digunakan reliabel atau andal.

Hasil uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik (grafik P-P Plot) dan uji statistik (Uji Kolmogrov-Smirnov). Dengan menggunakan grafik *Probability Plot*, dikatakan normal jika mengikuti garis diagonal. Apabila nilai signifikansi dari pengujian lebih dari nilai alpha 0,05, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Hasil Normal Probability Plot untuk uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 2, dan hasil uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Gambar 2. Normal P-P Plot



Sumber: Data olahan, 2022

Tabel 3. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov

		<i>Standardized Residual</i>
N		205
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.98766907
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.059
	<i>Positive</i>	.056
	<i>Negative</i>	-.059
<i>Test Statistic</i>		.059
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.084 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data olahan, 2022

Grafik hasil pengujian menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal, dimana titik-titik di sekitar garis diagonal dan penyebarannya masih mengikuti garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas. Pada Uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) $> \alpha$ ($0,084 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui uji statistik terbukti data residual terdistribusi normal.

Hasil uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mendeteksi apakah model regresi yang dipakai bebas dari permasalahan. Jika Variance Inflation Faktor (VIF) > 10 artinya terdapat persoalan multikolonieritas diantara variabel bebas dan jika Variance Inflation Faktor (VIF) < 10 artinya tidak terdapat persoalan multikolonieritas diantara variabel bebas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji multikolonieritas

	Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	Penerapan SAP (X1)	.362	2.764
	SAKD (X2)	.340	2.940
	Kompetensi SDM (X3)	.429	2.330
	Lingkungan Pengendalian (X4)	.459	2.181
	Kepatuhan Terhadap Peraturan (X5)	.656	1.524

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

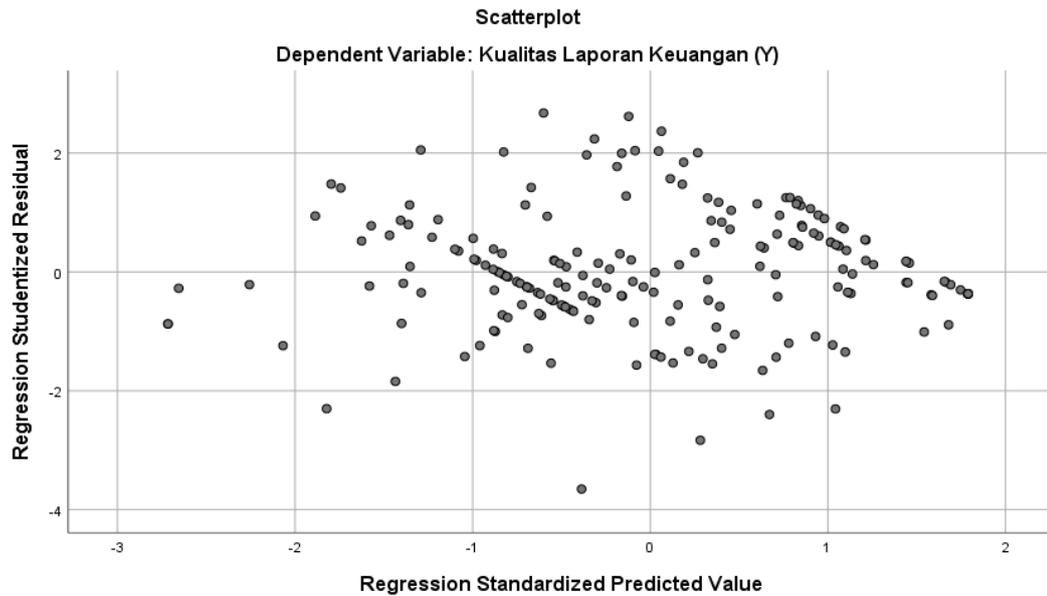
Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 diketahui bahwa perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan yang sama ditunjukkan pada nilai VIF, dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Hasil uji heteroskedastisitas



Sumber: Data olahan, 2022

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Hasil uji regresi linier berganda

Uji Statistik F (uji simultan)

Uji F digunakan untuk menguji hubungan regresi antar variabel dependen dengan seperangkat variabel independen. Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Statistik F

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	4248.068	5	849.614	98.117	.000 ^b
	Residual	1723.171	199	8.659		
	Total	5971.239	204			

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Predictors: (Constant), Kepatuhan Terhadap Peraturan (X5) , Kompetensi SDM (X3), Lingkungan Pengendalian (X4), Penerapan SAP (X1), SAKD (X2)

Sumber: Data olahan, 2022

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung (98,117) lebih besar dari nilai Ftabel (2,259), dan nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan SAP, pemanfaatan SAKD, kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh secara simultan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.328	2.029		2.133	.034
Penerapan SAP (X1)	.120	.034	.226	3.568	.000
SAKD (X2)	.232	.066	.229	3.511	.001
Kompetensi SDM (X3)	.193	.040	.280	4.810	.000
Lingkungan Pengendalian (X4)	.049	.013	.204	3.625	.000
Kepatuhan Terhadap Peraturan (X5)	.062	.063	.047	.998	.319

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik dengan kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi t pada taraf nyata 5% dan nilai t tabel sebesar 1,971 maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: penerapan SAP berpengaruh positif signifikan, pemanfaatan SAKD berpengaruh positif signifikan, kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan, lingkungan pengendalian berpengaruh positif signifikan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,328 + 0,120X1 + 0,232X2 + 0,193X3 + 0,049X4 + 0,062X5$$

Dimana: Y = Kualitas laporan keuangan

X1 = Penerapan SAP

X2 = Pemanfaatan SAKD

X3 = Kompetensi SDM

X4 = lingkungan pengendalian

X5 = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Interpretasi berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 4,328 merupakan nilai tetap dari variabel kualitas laporan keuangan jika diasumsikan variabel penerapan SAP, pemanfaatan SAKD, kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan bernilai nol. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
2. Koefisien regresi penerapan SAP sebesar positif 0,120 berarti setiap kenaikan nilai penerapan SAP sebesar satu satuan kualitas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,120 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.
3. Koefisien regresi pemanfaatan SAKD sebesar positif 0,232 berarti setiap kenaikan nilai pemanfaatan SAKD sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,232 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.
4. Koefisien regresi kompetensi SDM sebesar positif 0,193 berarti setiap kenaikan nilai kompetensi SDM sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,193 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.
5. Koefisien regresi lingkungan pengendalian sebesar positif 0,049 berarti setiap kenaikan nilai lingkungan pengendalian sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,049 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.

6. Koefisien regresi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar positif 0,062 berarti setiap kenaikan nilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,062 dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.

Hasil uji koefisien determinasi (R²)

Nilai yang digunakan untuk melihat uji koefisien determinasi yang adalah nilai Adjusted R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.843 ^a	.711	.704	2.94264

Predictors: (Constant), Kepatuhan Terhadap Peraturan (X5), Kompetensi SDM (X3), Lingkungan Pengendalian (X4), Penerapan SAP (X1), SAKD (X2)

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R= 0,843 *adjusted R Square* (R²) = 0,704. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel-variabel independen pada model dapat menjelaskan 70,4 % variasi pada variabel dependen, sedangkan 29,6% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

4.2. PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan

Pada pengujian pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan uji t diperoleh hasil tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($p < 0,05$) dan koefisien regresi positif 0,120. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nasution (2021) bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan, dan penelitian Tang (2020) bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Alor.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah di lingkungan pemerintahan daerah, maka akan semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Penerapan SAP berkaitan dalam hal penyajian laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran, koreksi dan laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan pendekatan goal setting theory, kinerja instansi pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuannya. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Pengguna akan menggunakan laporan keuangan dengan tujuan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengguna akan menggunakan laporan keuangan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan

keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Pengaruh SAKD terhadap kualitas laporan

Hasil penelitian terhadap 203 responden tentang pengaruh SAKD terhadap kualitas laporan dengan uji t mendapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($p < 0,05$) dan koefisien regresi sebesar positif 0,232 sehingga dapat disimpulkan bahwa SAKD berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah maka pegawai harus memanfaatkan SAKD yang ada dengan semaksimal mungkin karena membantu dalam melakukan penyusunan laporan.

Pemanfaatan SAKD berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan akan beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan kemudahan bagi perangkat/pejabat sehingga dapat melaksanakan pelaporan. Dengan demikian, semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohma et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang serta penelitian oleh Handayani (2020) yang menyatakan bahwa SAKD berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan

Pengujian pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan uji diperoleh hasil tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($p < 0,05$) dan koefisien regresi sebesar positif 0,193. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Semakin tinggi kompetensi SDM maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow akan semakin baik. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, maka semakin rendah pula kualitas laporan keuangan yang akan disajikan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan yang mengisi posisi atau jabatan di sebuah instansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Goal setting theory menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya dan akan berdampak terhadap kerjanya. Jika kompetensi sumber daya manusia baik maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosmalita dan Nadirsyah (2020) bahwa SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh.

Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan lingkungan pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ($p < 0,05$). Hal tersebut terbukti dengan hasil kesimpulan atas pemahaman SPI oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2021, yaitu lingkungan pengendalian sudah efektif dengan dengan skor 2,53 dan secara menyeluruh atas SPI dengan skor 2,51. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian yang

memadai akan menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif karena lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi komponen pengendalian intern lainnya. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan (fraud) yang akan berdampak semakin baiknya kualitas laporan keuangan.

Goal setting theory menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Di dalam lingkungan pengendalian orang-orang dituntut untuk memahami tanggung jawab dan batasan wewenangnya, mempunyai komitmen dalam mematuhi kebijakan dan berperilaku sesuai standar etika organisasi. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Warongan et al. (2017) menemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pengaruh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan

Berbagai peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah bersama dengan legislatif dengan tujuan agar pengelolaan keuangan berkualitas, sehingga laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban eksekutif dapat dipercaya keandalannya. Teori *stewardship* berasumsi dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak jujur dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan organisasinya. Teori ini dapat digunakan untuk melihat perilaku pengelola keuangan daerah terkait motivasinya dalam bertindak untuk kepentingan pemilik pemerintah daerah yaitu masyarakat. Demikian juga *goal setting theory* bahwa individu bekerja dengan apa yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan, maka usaha dalam mencapai tujuan tersebut juga besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ($p > 0,05$). Hal tersebut mungkin disebabkan karena sebagian besar responden berasal dari OPD yang tidak memiliki temuan pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jumlah temuan audit ketidakpatuhan yang sedikit menunjukkan bahwa terdapat sedikit permasalahan pada laporan keuangan pemerintah daerah dan mengidentifikasi bahwa kualitas laporan keuangan telah baik. Temuan audit ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan digolongkan menjadi kasus kerugian daerah, kasus potensi kerugian daerah, kasus kekurangan penerimaan negara, dan kasus penyimpangan administrasi. Pemeriksaan atas kepatuhan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2021 menunjukkan adanya temuan ketidakpatuhan namun tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Fitriana et al. (2020) yang menyatakan bahwa Kepatuhan pada perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini LKPD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemanfaatan SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan demikian, semakin tinggi pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi.
3. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan kesimpulan, maka penyempurnaan yang disarankan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah metode survei selain melalui penyebaran angket/kuesioner juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan sehingga akan diperoleh hasil yang akurat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan diharapkan untuk mencari variabel lain karena pada penelitian ini hanya memperoleh hasil sebesar 70,4% sehingga masih ada faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. M., & Gayatri (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 23(2), 1253-1276. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p17>.
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(2), 1855-1869.
- BPK RI (2021). Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/1/2021. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, Ny. Dj. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5(3), 403-428
- Fikri, M. A, Inapty, B. A & Martiningsih, RR. S. P. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi* 9(1), 2017, 27-42. DOI: <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>
- Fitriana, N., Anugerah, R., & Fitrioso, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Dana Insentif Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi* 8(2); 2020, 123-135.
- Fitriani, A (2019). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis Universitas* 5(4), 2019, 113-122. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis>
-

- Gultom, S. (2019). Analisis Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Hubungan Antara Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Direktorat Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti (Tesis). Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Handayani, F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan (Tesis). Universitas Sumatera Utara. Medan
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi* 8(1), 104-121. <http://Dx.Doi.Org/10.30656/Jak.V8i1>.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon J. J. (2016). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability* 5(2), 98 - 109. <https://doi.org/10.32400/ja.14428.5.2.2016.98-109>
- Manullang, O. E. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Tesis). Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mawuntu, S . N, Manossoh, H; & Afandi, D. (2020). Pengaruh Kepatuhan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 260-268, <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28230.2020>
- Moha, F., Kalangi, L., & Warongan, D. L. J. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1359-1370
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 874-890.
- Nasution, E. Z. L. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tesis). Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Puspitawati, L., & Anggadini, D. S. (2019). The Influence of the Quality Accounting Information system to Quality of Accounting Information-Evidence in Indonesia. *Majalah Ilmiah Unikom*, 17(1), 3-12.
- Puspitawati, L., & Haq, P. U. N. (2020). Fit Model Test Kualitas Informasi Akuntansi Yang Dipengaruhi oleh Kualitas Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 25-37.
- Rohma, L., Askandar, S. N., & Sari, K. F. A., (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang. *Jurnal E-JRA* 9(5), 43-51.
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, N. H. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pegendalian Intern, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah, Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(2), 2017, 99-111. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Rosmalita, N., & Nadirsyah. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kulaitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5(2), 239-248.
- Suparwan, D. K. T., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2018) Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Dinas

Kabupaten Bangli. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
<http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13275>

Utama, R., Tanjung, A., & Sofyan, A. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten In. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*,4(1),1429–1443

Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan